

Satpol PP Ancam Tindak Tegas Pelaku Usaha yang Coba-coba Langgar Protokol Kesehatan

JAKARTA (IM) - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin (mengancam akan menindak tegas bagi para pelaku usaha yang mencoba melanggar protokol kesehatan (prokes). Tindakan tegas akan diberikan kepada pelaku usaha tanpa pandang bulu.

"Apabila masih ada (pelaku usaha) yang coba-coba melanggar protokol kesehatan, kami akan tetap melakukan penindakan secara tegas," kata Arifin, Senin (6/9).

Tindak tegas ini disampaikan karena masih ditemukan pelanggaran prokes yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Salah satu tindakan tegas diberikan Satpol PP DKI Jakarta kepada Holywings Kemang lantaran membuat kerumunan dan melanggar batas waktu operasional.

Arifin menyebutkan, sanksi untuk Holywings Kemang menjadi pembelajaran bagi para pelaku usaha lainnya agar tetap mematuhi aturan di masa PPKM.

"Ini pembelajaran kepada

pihak-pihak lain. Jangan kemudian melakukan pelanggaran protokol kesehatan karena akan menimbulkan dampak yang luas," ujarnya.

Selain itu, Arifin menyebutkan, sanksi-sanksi yang diberikan adalah bentuk penyalaman manusia di tengah pandemi Covid-19. Ia mengajak para pelaku usaha bekerja sama menegakkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Untuk diketahui, izin operasional Holywings Kemang dibekukan oleh Satpol PP DKI Jakarta selama masa PPKM. Holywings Kemang juga didenda sebesar Rp50 juta. Sanksi-sanksi diberikan setelah Holywings Kemang melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali.

Holywings Kemang disebut telah melanggar ketentuan jam operasional, kapasitas pengunjung, dan pelanggaran lainnya. Pelanggaran pertama dilakukan pada bulan Februari 2021, kedua pada Maret 2021, dan terakhir pada 5 September 2021. ● mar

Pemkab Bekasi Canangkan Zona Integritas WBK dan WBBM

CIKARANG PUSAT (IM) - Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan piagam oleh Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, di Ruang Command Center Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Senin (6/9).

Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan dalam sambutannya mengatakan, reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga pelayanan masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat dan profesional.

Untuk itu, dirinya menjelaskan Pemkab Bekasi telah mencanangkan pembangunan zona integritas pada lima perangkat daerah yakni, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi.

Dani Ramdan berharap, lima perangkat daerah tersebut, dapat melaksanakan rencana aksi pembangunan, monitoring, evaluasi berkala dan capaian pelaksanaan pembangunan.

"Semoga setelah pencaangan ini, seluruh perangkat daerah dapat menerapkan perilaku anti korupsi di segala bidang sehingga tercapai peningkatan WBK dan WBBM di lingkungan Pemkab Bekasi," tuturnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Senin (6/9) malam.

Lebih lanjut, Dani Ramdan mengatakan, Pencanangan zona integritas yang dilaksanakan di lima perangkat daerah di Pemkab Bekasi, dibutuhkan komitmen dari segenap komponen untuk dipegang teguh dan diimplementasikan demi peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik.

"Penyelenggaraan dari zona integritas menuju WBK dan WBBM ini, bukan hanya berbicara masalah pencegahan korupsi saja, tapi juga kualitas pelayanan publik juga harus ditingkatkan dan lebih optimal," ucapnya.

Dani Ramdan berharap, lima perangkat daerah yang juga sebagai pionir, dapat berjuang dengan keras dan bisa menjadi contoh untuk perangkat daerah lain menuju wilayah bebas korupsi, dan wilayah bersih melayani. ● mdl

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi persyaratan dalam Pasal 125 ayat 3 dan Pasal 127 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Arsi Wisata Lestari berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengembalian sebagian besar saham Perseroan yang telah diterbitkan yang mengakibatkan perubahan pendendalian dalam Perseroan.

Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditor dan pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan dengan maksud pengembalian saham-saham baru tersebut agar selambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini ditunjukkan kepada:

PT Arsi Wisata Lestari
Gedung Mid Plaza 2, Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman Kav 10-11, Jakarta Pusat 10220.

Jakarta, 8 September 2021
Direksi Perseroan PT Arsi Wisata Lestari

PENGUMUMAN

Berdasarkan Berita Acara RUPS sebagaimana tercantum dalam akta tanggal 04-09-2021 (empat september dua ribu dua puluh satu), nomor 01, dibuat oleh BABIBANG HERU DWIWIJO, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, para pemegang saham telah memutuskan untuk membubarkan perseroan terbatas PT. BUMI JAYA ABA DI CEMERLANG, berkedudukan di Surabaya dan menunjuk Sdr. GALIH KUSUMAWATI, S.H. sebagai Likuidator. Pengajuan tagihan dapat diajukan kepada likuidator dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini.

Ttd
Likuidator

PT. BUMI JAYA ABA DI CEMERLANG
Jl. Kertajaya No. 171, Surabaya.

PENGUMUMAN

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini mengumumkan rencana pengembalian sebagian besar saham Perseroan, dengan ini mengumumkan bahwa:

Perseroan akan melakukan peningkatan Modal Dasar serta Modal Ditetapkan dan Disetor dengan cara mengeluarkan saham baru yang diambil bagian oleh calon pemegang saham (pihak diluar pemegang saham) yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham mayoritas/pengendali. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kreditor, terkait dengan utang piutang, hak kewajiban, hubungan hukum dan lain-lain, yang berkeberatan atas rencana pengembalian saham tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Perseroan disertai bukti-bukti pendukung dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini.

PT LINTAS MARITIM INDONESIA
GAMA Tower Lantai 4 C-22,
Jl. HR Rasuna Said Kav C22,
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan,
DKI Jakarta - Indonesia

Jakarta, 8 September 2021
Direksi

PT. LINTAS MARITIM INDONESIA

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



KLOTER TERAKHIR

PARALIMPIADE INDONESIA TIBA

Menpora Zainudin Amali (ketiga kiri) memberikan sambutan saat penyambutan kedatangan kontingen Paralimpiade Indonesia di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (7/9). Kontingen Indonesia berhasil membawa pulang sembilan medali pada Paralimpiade Tokyo 2020.

Tak Ada Lagi RT Zona Merah di Jakarta

Setiap pencapaian pengendalian Covid-19 adalah peringatan agar tetap taat protokol kesehatan dan melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 secara bertanggung jawab. Menurut Wagub DKI, terbuka kemungkinan DKI Jakarta kembali ke zona merah jika tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas.

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebutkan, tidak ada lagi rukun tetangga (RT) zona merah sejak Senin (6/9).

Pada pekan sebelumnya, 30 Agustus-5 September, tersisa tiga RT zona merah di Jakarta. Menurut Riza, pencapaian tersebut merupakan kerja kolektif dan kolaboratif

semua pihak di Jakarta.

"Data ini terbuka, semua warga bisa mengecek di lapangan atau di situs corona.jakarta.go.id. Dengan hormat, kami mengucapkan terima kasih sekali untuk seluruh warga yang disiplin dan seluruh petugas lintas dinas, dan banyak sekali peran berbagai organisasi maupun pribadi," ujar Riza melalui akun Instagramnya, Selasa (7/9).

Namun, Riza mengingatkan, setiap pencapaian pengendalian Covid-19 adalah peringatan agar tetap taat protokol kesehatan dan melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 secara bertanggung jawab.

Menurut Riza, terbuka kemungkinan DKI Jakarta

kembali ke zona merah jika tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas.

"Kita pasti akan kembali ke zona merah, jika kita tidak disiplin. Jangan sampai kita jadi pemicu naiknya kasus kembali," tandas dia.

Riza berharap peran serta masyarakat untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dengan melaporkan berbagai pelanggaran protokol kesehatan atau PPKM level 3 melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki).

"Untuk itu, terima kasih kepada seluruh warga yang melaporkan berbagai pelanggaran lewat aplikasi Jaki, dan terima kasih kepada para petugas yang terus menindak tegas setiap pelanggaran, ini demi

keselamatan seluruh warga. Salam Jakarta Bangkit," pungkask Riza.

Jika merujuk pada situs corona.jakarta.go.id, sudah tidak ada lagi RT zona merah di Jakarta sebagaimana tergambar Peta Pengendalian Wilayah Skala RT periode untuk 6-12 September 2021.

Meskipun demikian, masih terdapat 1.467 RT yang masuk dalam RT zona rawan dengan perincian 10 RT zona oranye dan 1.457 RT zona kuning.

Wilayah Jakarta Timur merupakan RT paling banyak dengan RT zona rawan, yakni 392 RT dengan perincian 5 RT zona oranye dan 387 RT zona kuning. Total jumlah RT di Jakarta sebanyak 30.482 RT. ● yan

Babinsa Koramil Tanah Abang Awasi Prokes di Dua Titik Sentra Vaksinasi

JAKARTA (IM) - Tiga Pilar gabungan monitoring percepatan vaksinasi Covid-19, bagi warga di lingkungan binaan, sekretariat RW 06 Kebon Melati, dan di Nusantara IV (Pustakaloka) DPR/MPR, Komplek Parlemen, kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (7/9).

Gerai vaksinasi di sekretariat RW 06 diselenggarakan oleh Pemrov DKI Jakarta bersama Bank DKI untuk warga sekitar. Sementara Sentra Vaksinasi di Komplek Parlemen untuk anggota dan pegawai Setjen DPR RI.

Kegiatan monitoring yang dilakukan berupa pengawasan penerapan protokol kesehatan dan pengamanan vaksinasi.

"Kami Tiga Pilar di Kebon Melati melakukan pengawasan pada kegiatan vaksinasi Covid-19 di wilayah binaan, agar vaksinasi berjalan tertib, aman dan lancar," ujar Danramil 05/Tanah Abang, Mayor Arh Saryono.

Hal itu juga dilakukan, lanjut Danramil, guna memastikan seluruh warga masyarakat mendapatkan vaksin Covid-19. "Ini dilakukan untuk mensukseskan percepatan vaksinasi agar tercipta kekebalan lingkungan, menuju Indonesia sehat," katanya.

Dijelaskan Danramil, target harian Covid-19 di lingkungan binaannya untuk 700 orang.

Adapun monitoring diikuti oleh Babinsa, anggota Koramil 05/Tanah Abang, Bhabinkamtibmas, anggota Polsek



metro Tanah Abang, Satpol PP Kebon Melati dan Satpol

PP Tanah Abang, serta Sudin Kesehatan Jakarta Pusat. ● tom

Babinsa Koramil 07 Kemayoran Monitoring Vaksinasi di Aula Mushola Al-Ikhlas



Tampak anggota Babinsa Koramil 07, Kemayoran mengawasi kegiatan vaksinasi.

JAKARTA (IM) - Sertu Agus R, anggota Babinsa Koramil 07 Kemayoran, Jakarta Pusat, melakukan monitoring kegiatan vaksinasi Covid-19, di Aula Mushola Al-Ikhlas, RT 03/RW 01, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (7/9).

Monitoring merupakan pengawasan dan pengamanan dengan menerapkan protokol kesehatan, agar vaksinasi berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

"Anggota kita selalu mengadakan pengawasan protokol kesehatan pada kegiatan vaksinasi Covid-19, supaya tertib,

aman dan lancar," ujar Danramil 07 Kemayoran, Mayor Chb Endang Rahmat.

Ia menjelaskan, tenaga kesehatan dipimpin dr. Dewi Indah melayani vaksinasi jenis AztraZeneca dan Sinovac, dengan target kuota 400 orang.

Endang berharap, seluruh warga masyarakat Kemayoran untuk divaksin Covid-19 untuk menciptakan kekebalan lingkungan. "Bagi warga yang sudah divaksin agar tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat serta mematuhi protokol kesehatan di mana pun berada," pungkasnya. ● ber

Sekolah di Kabupaten Bekasi Mulai Berlakukan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

TAMBUK SELATAN (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendorong penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terhadap sekolah-sekolah yang telah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, baik Sekolah Negeri maupun Swasta di 1.337 PAUD dan Pendidikan Non Formal, 1.019 Sekolah Dasar (SD), 361 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Hal tersebut disampaikan Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, saat meninjau lokasi sekolah pertama yakni SMPN 1 Tambun Selatan menyampaikan, sekolah ini dinilai mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan PTM, yakni dengan adanya fasilitas pengecekan suhu tubuh untuk para siswa dan guru, disediakannya tempat cuci tangan, fasilitas toilet yang bersih, hingga semua tenaga pengajarnya yang sudah ter-vaksinasi.

"Dalam dunia pendidikan, jalan tengah yang kita ambil adalah tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat, fasilitas cuci tangan, suhu tubuh, dan toilet yang bersih. Tidak semua sekolah kita luluskan untuk menjalankan tatap muka ini, dari sekitar 2.700 sekolah yang ada, sebanyak 29 sekolah yang tidak diizinkan, karena baik fasilitas kesehatan dan kesiapan gurunya belum memenuhi syarat," ujar Dani dalam wawancara terpisah.

Ia juga menjelaskan, peraturan PTM di kelas hanya memiliki kapasitas 50 persen dari sebelumnya, serta di setiap lingkungan sekolah juga diwajibkan untuk memiliki Satuan Gagas (Satgas) Covid-19 untuk meminimalisir terjadinya kerumunan dan kontak fisik yang erat antar sesama siswa.

"Kapasitas kelas hanya diperbolehkan 50 persen, supaya murid di kelas tetap jaga jarak, tidak boleh melepas masker, dan durasi belajar hanya 2 jam saja tanpa istirahat, serta harus ada Satgas di setiap sekolah," jelasnya.

Lebih lanjut, Ia mengatakan sekolah yang melanggar aturan protokol kesehatan nantinya akan diberikan sanksi berupa pencabutan izin sekolah tatap muka. "Akan terus dipantau oleh Dinas Pendidikan, dibantu

juga oleh Pak Camat. Nanti di investigasi dulu, kalau ada kelalaian akan diberi teguran bahkan dicabut izinya," katanya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Senin (6/9) malam.

Dirinya menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini sedang berada di titik dilematis antara kesehatan dengan pendidikan. Ia juga menginginkan sisi ekonomi, pendidikan dan sosial harus berjalan secara efektif.

"Bagi Pemerintah sebenarnya ini dilematis dalam pandemi ini. Tetapi, di luar kesehatan kita ada kehidupan ekonomi, sosial dan pendidikan yang semuanya tetap membutuhkan interaksi. Oleh karena itu, kita ambil di satu sisi protokol kesehatan dijalankan, sisi lain ekonomi, sosial, pendidikan harus tetap berjalan," tambahnya.

Pj. Bupati Dani juga menjelaskan, mengenai vaksinasi untuk anak usia 12 tahun ke atas kesiapannya baru sekitar 8 persen, dan Kabupaten Bekasi memiliki prestasi dalam laju vaksinasi tercepat sehingga Pemkab Bekasi akan terus berusaha mengencakan vaksinasi tersebut. "Sekarang baru sekitar 8 persen, tapi akan terus kita

FOTO : DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (kiri, gambar bawah) saat meninjau pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMPN 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (6/9).

dorong. Alhamdulillah, minggu ini Kabupaten Bekasi laju vaksinasinya tertinggi, karena masuk aglomerasi Jabodetabek di luar Jakarta, maka atas prestasi itu Kabupaten Bekasi mendapatkan pasokan vaksinasi terbesar di antara kabupaten atau kota lainnya," jelasnya.

Setelah meninjau SMPN 1 Tambun Selatan, Pj. Bupati Bekasi beserta rombongan bergegas menuju lokasi yang

kedua, yaitu Sekolah Putradar-ma Global Islamic School, yang juga berlokasi di Tambun Selatan.

Di sekolah tersebut, Pj. Bupati menyapa para siswa SD dan TK dan memberi himbauan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yakni menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mencuci tangan, pakai masker, dan menjauhi kerumunan. ● mdl